

## Analisis Belanja Daerah Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023

Adimas Putra Djati Pamungkas<sup>1\*</sup>, Imanudin Kudus<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Padjadjaran

\* E-mail Korespondensi: adimas21001@mail.unpad.ac.id

### Information Article

*History Article*

*Submission: 04-07-2025*

*Revision: 17-07-2025*

*Published: 02-08-2025*

**DOI Article:**

**10.24905/permana.v17i3.1019**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Bagaimana kinerja belanja daerah pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Klaten tahun anggaran 2021–2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), analisis dilakukan melalui empat indikator utama: selisih belanja (varians), pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan efisiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio varians belanja menunjukkan hasil yang baik, karena rata-rata realisasi lebih kecil dari anggaran, yaitu sebesar -6,70%. sehingga termasuk dalam kategori selisih disukai (favourable). Pertumbuhan belanja menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 70,78%. Hasil keserasian belanja pada rasio belanja operasional sebesar 76,69% dan dikategorikan seimbang, namun pada rasio belanja modal sebesar 23,31% menunjukkan ketidakseimbangan. Rasio efisiensi belanja menunjukkan angka 93,30% atau dikategorikan efisien. Secara keseluruhan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten mampu mengelola anggaran dengan baik dan efisien dalam pengelolaan belanja daerah melalui pemanfaatan anggaran yang hemat dan optimal.

**Kata Kunci:** Disbudporapar Kabupaten Klaten, Belanja Daerah, Efisiensi Anggaran

### ABSTRACT

*This study aims to evaluate how regional spending performance at Department Of Culture, Youth And Sports And Tourism Klaten Regency for the 2021–2023 fiscal year. Using a descriptive quantitative approach based on Budget Realization Report data, the analysis was carried out through four main indicators: variance, expenditure growth, expenditure harmony and expenditure efficiency. The results of the study show that: (1) The expenditure variance ratio shows good results, because the average realization is smaller than the budget, which is -6.70%. so*

### Acknowledgment

---

*that it is included in the category of preferable difference; (2) Expenditure growth shows an increasing trend every year with an average of 70.78%; (3) The result of expenditure compatibility in the operating expenditure ratio is 76.69% and is categorized as balanced, but the capital expenditure ratio of 23.31% shows an imbalance; (4) The expenditure efficiency ratio shows 93.30% or is categorized as efficient. Overall, Department Of Culture, Youth And Sports And Tourism Klaten Regency is able to manage the budget properly and efficiently in managing regional expenditures through the use of a frugal and optimal budget*

**Key word:** *Disbudporapar Klaten Regency, Regional Expenditure, Budget Efficiency*

---

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam mendukung proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Proses ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor dalam menentukan keberhasilan pembangunan serta tata kelola pemerintah daerah.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata. Melalui sektor pariwisata dan budaya yang menjadi potensi unggulan daerah, dinas ini turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi Covid-19, pengelolaan belanja daerah menjadi fokus utama untuk mendorong pemulihan ekonomi lokal. Pada periode 2021–2023, anggaran belanja daerah untuk Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten mengalami peningkatan signifikan. Data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten tahun 2021-2023 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam alokasi dan realisasi belanja daerah selama periode ter-

sebut.

**Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Disbudporapar Kab. Klaten 2021-2023**

Tahun	Klasifikasi	Operasi	Modal	Total Belanja
2021	Anggaran	10.488.528.630	1.910.893.152	12.399.421.782
	Realisasi	9.717.600.872	1.859.356.000	11.576.956.872
2022	Anggaran	17.106.006.862	5.957.177.000	23.063.183.862
	Realisasi	16.206.742.739	5.428.775.000	21.635.517.739
2023	Anggaran	33.001.063.590	13.259.455.705	46.260.519.295
	Realisasi	30.556.156.835	12.342.860.682	42.899.017.517

Sumber: Disbudporapar Kab. Klaten (2025)

Berdasarkan tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten tahun 2021-2023, terdapat dinamika antara anggaran yang dialokasikan dan realisasinya. Pada tahun 2021, total anggaran sebesar Rp12,39 miliar dengan realisasi Rp11,57 miliar. Pada tahun 2022, anggaran meningkat 86% menjadi Rp23,06 miliar, dengan realisasi Rp21,63 miliar. Tahun 2023, anggaran melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi Rp46,26 miliar, dengan realisasi mencapai Rp42,89 miliar atau 92,74%. Data tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja daerah pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah diartikan sebagai seluruh kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan bersih selama satu tahun anggaran. Menurut Yuesti et al. (2020), belanja daerah merupakan dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dan dicatat dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja kemudian dikategorikan sebagai berikut; Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kabupaten Klaten, khususnya pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, telah memanfaatkan APBD secara efisien, ekonomis, dan tepat sasaran, serta menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Menurut Mahmudi (2019) analisis belanja daerah digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran oleh pemerintah daerah, sekaligus menghindari terjadinya pemborosan. Untuk menganalisis kinerja pengelo-

laan belanja daerah, digunakan teori analisis belanja daerah yang dikemukakan oleh oleh Mahmudi (2019) yang mencakup beberapa pendekatan yaitu, Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keceragaman Belanja, dan Analisis Efisiensi Belanja. Keempat pendekatan tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja belanja daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program.

Laoli et al. (2022) menyatakan bahwa penyelenggaraan keuangan daerah harus berlandaskan prinsip-prinsip umum, seperti pengelolaan yang tertib, taat pada aturan perundang-undangan, serta dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, prinsip keadilan dan kepatutan juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Selain itu, Said & Bakar (2021) juga menyebutkan bahwa 3 prinsip utama dalam tata kelola keuangan daerah meliputi transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi berarti keterbukaan informasi dalam setiap proses pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran secara jelas dan mudah. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dengan profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, *value for money* menjelaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, untuk memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat yang sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan.

Anggaran merupakan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dalam satu tahun anggaran (Haryanto et al., 2007). Menurut Nurachman & Sopiha (2024) anggaran juga dapat dipahami sebagai rencana jangka pendek yang merinci program strategis ke dalam perencanaan keuangan tahunan yang lebih konkret dan terukur. Sementara itu, Wijaya et al. (2023) menyatakan bahwa anggaran merupakan output dari proses perencanaan manajemen yang krusial, karena dengan melakukan analisis anggaran, manajemen dapat memprediksi kebutuhan pengeluaran secara lebih akurat, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas anggaran yang telah ditentukan.

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi seperti, alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, alat untuk menciptakan ruang publik (Yuesti et al., 2020). Anggaran tidak hanya menjadi pedoman dalam alokasi sumber daya, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Amelia (2022) menegaskan bahwa anggaran juga berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, stabilisasi ekonomi, distribusi sumber daya, serta

alokasi keuangan publik.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada publik. Edtiyarsih (2023) menjelaskan bahwa APBD merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan yang dirancang oleh pemerintah daerah guna mengelola arus masuk dan keluarnya dana selama satu tahun anggaran. APBD berfungsi sebagai alat yang mencakup seluruh program serta kebijakan pemerintah daerah Arso & Hi Abas (2021). APBD juga menjadi tolak ukur pemerintah daerah dalam merancang, mengelola, dan mengawasi seluruh aspek keuangan daerah selama periode anggaran berlangsung (Shalsabila & Kamilah, 2022).

Menurut Magdalena Y. Devinci et al. (2023) Struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang mencakup komponen utama seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan, yang keseluruhannya terangkum dalam dokumen APBD. Komponen ini mencakup berbagai jenis pendapatan, jenis belanja, serta sumber pembiayaannya. Hal ini sejalan dengan PP No. 12 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa struktur APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah.

## METODE PENELITIAN

Objek penelitian pada penelitian adalah anggaran belanja daerah pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Disbudporapar Kabupaten Klaten tahun 2021-2023, sedangkan sampel yang digunakan adalah pos-pos anggaran dan realisasi belanja pada periode tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, dengan data yang diperoleh dari LRA Disbudporapar Kabupaten Klaten tahun 2021-2023. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis belanja daerah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2019). Penyajian hasil analisis dalam statistik deskriptif dilakukan melalui tabel, grafik, persentase, dan bentuk visual lainnya (Sugiyono, 2020):

### Analisis Varians Belanja

$$\text{Rasio Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

**Tabel 1. Kriteria Varians Belanja**

Kategori	Skala Perbandingan
Favourable Variance (Selisih Disukai)	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Unfavourable Variance (Selisih Tidak Disukai)	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber: Mahmudi (2019)

**Analisis Pertumbuhan Belanja**

Rasio Pertumbuhan Belanja Thn t

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Thn t} - \text{Realisasi Belanja Thn (t - 1)}}{\text{Realisasi Belanja Thn (t - 1)}} \times 100\%$$

**Tabel 3. Kriteria Pertumbuhan Belanja**

Kategori	Predikat
Naik	Baik
Turun	Tidak Baik

Sumber: Mahmudi (2019)

**Analisis Keserasian Belanja**

Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

**Tabel 4. Kriteria Keserasian Belanja**

Kategori	Nilai Kinerja	Keterangan
Belanja Operasi	60% s.d 90%	Jika proporsi belanja berada dalam nilai kinerja dapat dikatakan <b>seimbang</b> , namun jika lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai kinerja dikatakan <b>ketidakseimbangan</b> .
Belanja Modal	5% s.d 20%	

Sumber: Mahmudi (2019)

**Rasio Efisiensi Belanja**

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 5. Kriteria Efisiensi Belanja**

Nilai Kinerja	Keterangan
< 90%	Sangat Efisien
90% sampai dengan 99%	Efisien
100%	Cukup Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2016)

## HASIL

### Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja dilakukan untuk menilai perbedaan antara anggaran belanja yang direncanakan dengan realisasinya. Berikut adalah hasil perhitungan analisis varians belanja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023:

**Tabel 6. Hasil Analisis Varians Belanja**

Tahun	Klasifikasi	Total Belanja	Varians Belanja	%	Keterangan
2021	Anggaran	12.399.421.782	-822.464.910	-6,63%	<i>Favourable</i>
	Realisasi	11.576.956.872			
2022	Anggaran	23.063.183.862	-1.427.666.123	-6,19%	<i>Favourable</i>
	Realisasi	21.635.517.739			
2023	Anggaran	46.260.519.295	-3.361.501.778	-7,27%	<i>Favourable</i>
	Realisasi	42.899.017.517			
Rata-rata				-6,70%	

Sumber: Olah data penulis 2025

Berdasarkan tabel 6 Pada tahun 2021, total anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp12.399.421.782,00, namun realisasi belanja yang tercapai hanya sebesar Rp 11.576.956.-872,00. Hal ini menyebabkan varians belanja negatif sebesar Rp 822.464.910,00 atau sekitar -6,63%, yang dikategorikan sebagai varians *favorable* (selisih disukai). Artinya, realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran sehingga ada sisa dana yang belum terpakai. Kondisi ini menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang cermat, meskipun perlu dipastikan bahwa penghematan ini tidak mengganggu pencapaian tujuan program.

Tahun 2022 menunjukkan pola yang serupa dengan tahun sebelumnya, dimana anggaran belanja sebesar Rp 23.063.183.862,00, dan realisasi sebesar Rp 21.635.517.739,00. Varians belanja mencapai Rp 1.427.666.123,00 atau -6,19%, juga masuk dalam kategori *favorable*.

Penurunan realisasi dibandingkan anggaran dapat mengindikasikan efisiensi dalam penggunaan dana, tetapi juga bisa menandakan adanya keterlambatan atau pengurangan kegiatan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi lebih mendalam terkait penyebab selisih antara anggaran dan realisasi ini, guna mencegah potensi dampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan menjadi Rp 46.-260.519.295,00, dengan realisasi sebesar Rp 42.899.017.517,00. Varians belanja sebesar Rp 3.361.501.778,00 atau -7,27% tetap berada pada kategori selisih disukai (*favorable*). Meski varians ini menunjukkan adanya sisa anggaran yang tidak terserap, persentasenya sedikit lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pola konservasi dalam pengelolaan anggaran yang tetap berorientasi pada efisiensi, namun perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan potensi yang dapat menghambat pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, varians belanja pada ketiga tahun tersebut menunjukkan kecenderungan *favorable* (selisih disukai) yang konsisten. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian anggaran dengan baik sehingga penggunaan dana publik dapat berjalan efisien. Namun, adanya varians *favorable* yang terus berulang juga harus diwaspadai agar tidak terjadi ketidakefisienan dalam pencapaian target pembangunan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara mendalam terkait penyebab varians untuk memastikan bahwa sisa anggaran tidak berdampak pada kinerja dan pelayananan.

### Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk menilai dinamika perubahan belanja daerah dari tahun ke tahun. Berikut adalah hasil perhitungan analisis pertumbuhan belanja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023:

**Tabel 7. Hasil Analisis Pertumbuhan Belanja**

Tahun	Realisasi Belanja	Pertumbuhan		Keterangan
		Kenaikan Belanja	%	
2020	9.103.300.120			
2021	11.576.956.872	2.473.656.752	27,17%	Naik
2022	21.635.517.739	10.058.560.867	86,88%	Naik
2023	42.899.017.517	21.263.499.778	98,28%	Naik
	Rata-Rata		70,78%	

Sumber: Olah data penulis 2025



Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, realisasi belanja pemerintah daerah sebesar Rp 11.576.956.872,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.473.656.752,00 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9.103.300.120,00. Pertumbuhan belanja tahun ini mencapai 27,17%, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan anggaran dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan respons pemerintah daerah yang positif terhadap meningkatnya kebutuhan pembangunan dan layanan masyarakat, sekaligus menunjukkan adanya penyesuaian program agar lebih selaras dengan prioritas daerah.

Tahun 2022 mencatat lonjakan realisasi belanja yang cukup besar, yakni sebesar Rp 21.635.517.739,00, dengan kenaikan sebesar Rp 10.058.560.867,00 dari tahun 2021. Pertumbuhan ini mencapai angka 86,88%, yang tergolong sangat signifikan dan mengindikasikan adanya ekspansi besar dalam kegiatan dan program pemerintah daerah. Peningkatan tajam ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti alokasi dana yang lebih besar, prioritas pembangunan yang berubah, atau pelaksanaan proyek-proyek strategis yang membutuhkan pendanaan lebih besar. Namun, perlu juga diperiksa apakah pertumbuhan belanja ini berdampak pada peningkatan hasil yang optimal.

Pada tahun 2023, realisasi belanja kembali meningkat pesat menjadi Rp 42.899.017.517,00, dengan pertumbuhan sebesar Rp 21.263.499.778,00 atau 98,28% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang hampir mencapai dua kali lipat ini menunjukkan percepatan dalam pemanfaatan anggaran serta penambahan cakupan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Meskipun pertumbuhan yang besar ini menggambarkan ekspansi fiskal yang kuat, penting untuk memastikan bahwa peningkatan belanja tersebut diiringi dengan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program agar tidak menimbulkan pemborosan sumber daya.

Secara keseluruhan, pertumbuhan belanja pada periode 2021 hingga 2023 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dan signifikan. Hal ini menandakan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pemanfaatan anggaran untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Pertumbuhan belanja yang positif ini merupakan indikator baik yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, pemerintah daerah harus tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan anggaran dengan kualitas hasil dan akuntabilitas penggunaan dana.

Salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan belanja daerah selama periode 2021 hingga 2023 adalah adanya kebijakan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pemerintah daerah mendorong peningkatan anggaran, khususnya pada sektor kebudayaan dan pariwisata, guna mempercepat pemulihan ekonomi lokal dan memperbaiki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sempat terdampak selama masa pandemi. Kebijakan ini meliputi penyelenggaraan kembali event-event budaya, revitalisasi objek wisata, serta promosi pariwisata daerah secara lebih intensif. Oleh karena itu, lonjakan belanja ini tidak semata-mata bersifat ekspansi fiskal, melainkan juga merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah.

## Analisis Keserasian Belanja

### Rasio Belanja Operasi

Analisis belanja operasi dilakukan untuk menilai alokasi anggaran pada kegiatan rutin pemerintahan. Berikut adalah hasil analisis belanja operasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023.

**Tabel 8. Hasil Analisis Rasio Belanja Operasi**

Tahun	Klasifikasi	Total Belanja	Keserasian Belanja		Keterangan
			Operasi	%	
2021	Realisasi	11.576.956.872	9.717.600.872	83,94%	Seimbang
2022	Realisasi	21.635.517.739	16.206.742.739	74,91%	Seimbang
2023	Realisasi	42.899.017.517	30.556.156.835	71,23%	Seimbang
		Rata-Rata		76,69%	

Sumber: Olah data penulis 2025

Berdasarkan tabel 8 menjelaskan bahwa tahun 2021, total belanja yang direalisasikan sebesar Rp 11.576.956.872,00, dengan belanja operasi sebesar Rp 9.717.600.872,00 atau realisasi belanja operasi mencapai 83,94%. Angka ini menunjukkan keserasian yang cukup baik dan berada dalam kategori seimbang menurut kriteria Mahmudi (2019), yaitu antara 60% hingga 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memprioritaskan biaya operasional yang proporsional dan tidak berlebihan, sehingga anggaran yang tersisa masih bisa dialokasikan untuk belanja modal dan program pembangunan.

Kemudian tahun 2022, total belanja mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 21.-635.517.739,00, dengan realisasi belanja operasi mencapai Rp 16.206.742.739,00, namun proporsi realisasi belanja operasi menurun menjadi 74,91%. Meskipun terjadi penurunan, persentase ini tetap berada dalam batas seimbang dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai

mengarahkan sebagian anggaran untuk pengeluaran di luar operasional rutin. Hal ini dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan alokasi dana untuk investasi dan pembangunan daerah, tanpa mengabaikan kebutuhan pokok operasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran meningkat, proporsi belanja operasi masih dijaga dalam batas yang wajar.

Tahun 2023 total belanja meningkat tajam menjadi Rp 42.899.017.517,00, dan realisasinya hanya sebesar Rp 30.556.156.835,00 dan persentase realisasinya kembali menurun menjadi 71,23%. Meskipun terus turun, angka tersebut masih menunjukkan keserasian yang baik dan seimbang. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran prioritas ke arah belanja modal yang lebih besar, yang merupakan tanda positif dalam konteks pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur serta pelayanan publik di daerah.

Secara keseluruhan, selama periode 2021 hingga 2023, proporsi belanja operasi selalu berada dalam rentang seimbang. Selama tiga tahun terakhir, rata-rata proporsi belanja operasional berada di angka 76,69%, yang menegaskan dominasi belanja operasi dalam struktur belanja dinas. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola belanja operasional secara proporsional dan tidak berlebihan, menjaga stabilitas pengeluaran rutin sekaligus memberikan ruang untuk pengembangan program lainnya.

### Rasio Belanja Modal

Analisis belanja modal dilakukan untuk mengetahui proporsi anggaran yang digunakan dalam pembangunan aset tetap daerah. Berikut adalah hasil analisis belanja modal Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023:

**Tabel 9. Hasil Analisis Rasio Belanja Modal**

Tahun	Klasifikasi	Total Belanja	Keserasian Belanja Modal		Keterangan
				%	
2021	Realisasi	11.576.956.872	1.859.356.000	16,06%	Seimbang
2022	Realisasi	21.635.517.739	5.428.775.000	25,09%	Ketidakseimbangan
2023	Realisasi	42.899.017.517	12.342.860.682	28,77%	Ketidakseimbangan
		Rata-Rata		23,31%	

Sumber: Olah data penulis 2025

Berdasarkan tabel 9 mengenai rasio belanja modal pada tahun 2021, proporsi realisasi belanja modal mencapai 16,06% atau anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.859.356.000,00 dari total belanja Rp 11.576.956.872,00. Persentase ini menunjukkan bahwa pengeluaran modal sudah berada dalam kategori seimbang menurut kriteria yang berlaku, yaitu antara 5% hingga 20%. Hal ini mengindikasikan perhatian yang cukup baik dari pemerintah daerah

terhadap pembangunan aset dan investasi jangka panjang yang mendukung pengembangan sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan kebudayaan pada tahun tersebut.

Tahun 2022 terjadi kenaikan pada realisasi belanja modal menyentuh Rp 5.428.775.-000,00 dari total belanja Rp 21.635.517.739,00. Hal ini tentu menunjukkan perubahan signifikan dengan peningkatan proporsi realisasi belanja modal menjadi 25,09%. Perubahan ini membuat angka proporsi realisasi belanja modal melebihi batas atas kriteria keserasian, yang berarti pada tahun 2022 terjadi ketidakseimbangan dalam proporsi belanja modal. Kenaikan ini menunjukkan adanya kebijakan afirmatif pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan budaya yang sangat terdampak pandemi. Belanja modal mulai diarahkan untuk membangun dan merevitalisasi sarana pendukung wisata. Di sisi lain proporsi ini dapat menimbulkan risiko pengelolaan yang kurang proporsional jika tidak diimbangi dengan kebutuhan operasional yang memadai.

Pada tahun 2023, belanja modal kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dimana realisasi belanja modal mencapai Rp 12.342.860.682,00 dari total belanja Rp 42.-899.017.517,00. Proporsi belanja modal pada tahun 2023 menjadikan rasio tertinggi dalam 3 tahun terakhir yaitu 28,77%. Angka ini juga menunjukkan ketidakseimbangan pada keserasian belanja, hal ini disebabkan persentase realisasi belanja modal melebihi rentang batas nilai kinerja, yakni 5%-20%. Kenaikan signifikan pada proporsi yang dihasilkan tentu menandakan fokus yang sangat tinggi pada pengadaan aset atau pembangunan fisik dalam mendorong pertumbuhan PAD sektor pariwisata. Mengingat adanya potensi besar dalam sektor pariwisata berbasis alam, budaya, dan sejarah, peningkatan belanja modal diperuntukan untuk memperkuat daya tarik destinasi serta kenyamanan wisatawan sebagai strategi pemulihan ekonomi lokal. Meskipun memiliki komitmen pada pembangunan yang cukup tinggi, kondisi ini harus diwaspadai agar tidak mengganggu kelancaran operasional pemerintah daerah.

Secara umum, tren selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa proporsi belanja modal meningkat signifikan setiap tahunnya. Selama periode 2021 hingga 2023, rata-rata proporsi belanja modal berada pada angka 23,31%, yang menyebabkan ketidakseimbangan. Tren ini menunjukkan adanya orientasi kebijakan anggaran yang lebih condong pada pembangunan dan pengadaan aset jangka panjang, meskipun perlu ditelaah lebih lanjut efektivitas dari setiap investasi yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan adanya strategi baru pemerintah dalam mendorong PAD sektor pariwisata maupun kebudayaan pasca terjadinya pandemi Covid-19.

## Analisis Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi belanja dilakukan untuk mengukur efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung kinerja pemerintahan. Berikut adalah hasil perhitungan analisis efisiensi belanja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023:

**Tabel 6. Hasil Analisis Efisiensi Belanja**

Tahun	Klasifikasi	Total Belanja	%	Keterangan
2021	Anggaran	12.399.421.782	93,37%	Efisien
	Realisasi	11.576.956.872		
2022	Anggaran	23.063.183.862	93,81%	Efisien
	Realisasi	21.635.517.739		
2023	Anggaran	46.260.519.295	92,73%	Efisien
	Realisasi	42.899.017.517		
Rata-Rata			93,30%	

Sumber: Olah data penulis 2025

Berdasarkan hasil analisis tabel 10, pada tahun 2021 tingkat efisiensi belanja berdasarkan data anggaran mencapai 93,37%, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan dana anggaran secara efisien. Realisasi belanja sebesar Rp 11.576.956.872,00 dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp 12.399.421.782,00 menunjukkan adanya penghematan yang baik. Tingkat efisiensi ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan penghindaran pemborosan. Kondisi ini sangat positif dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Tahun 2022 menunjukkan hasil efisiensi yang serupa dengan persentase efisiensi sebesar 93,81%. Realisasi belanja sebesar Rp 21.635.517.739,00 dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp 23.063.183.862,00. Angka ini sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, menandakan bahwa pemerintah daerah tetap menjaga pengelolaan anggaran secara efektif meskipun terdapat peningkatan jumlah anggaran yang cukup besar. Realisasi belanja yang masih di bawah anggaran menunjukkan disiplin dalam penggunaan dana sehingga tidak terjadi pemborosan atau penggunaan yang tidak sesuai. Hal ini menjadi indikasi bahwa pengelolaan keuangan semakin matang dan profesional.

Pada tahun 2023, persentase efisiensi belanja kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 92,73% dengan Realisasi belanja sebesar Rp 42.899.017.517,00 dari total anggaran belanja Rp 46.260.519.295,00. Tetapi hasil presentase ini masih berada dalam kategori efisien menurut kriteria yang berlaku. Penurunan efisiensi ini bisa saja disebabkan oleh peningkatan

kebutuhan belanja akibat intensifikasi program pembangunan atau kenaikan biaya operasional. Meskipun demikian, angka efisiensi yang masih di atas 90% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran masih sangat terkontrol dan sesuai dengan perencanaan. Pemerintah daerah masih berhasil mengelola anggaran dengan baik walaupun volume belanja meningkat drastis.

Secara keseluruhan, hasil analisis efisiensi belanja selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara efisien dan profesional. Tidak ada indikasi pemborosan besar atau penggunaan dana yang tidak efektif. Yang dimana rata-rata tingkat efisiensi di 93,30%, yang berarti persentase ini konsisten di rentang 90% - 99%. Sehingga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga disiplin fiskal serta memanfaatkan anggaran secara optimal demi pelayanan publik yang maksimal

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan Mahmudi (2019), dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten selama tahun 2021–2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Varians belanja pada tahun 2021–2023 masih dikategorikan sebagai selisih disukai (*favorable*) dengan rata-rata -6,70%, mencerminkan efisiensi anggaran meskipun tetap perlu diwaspadai agar tidak menghambat program lainnya. Pertumbuhan belanja menunjukkan tren positif dengan rata-rata 70,78%, menandakan pertumbuhan kegiatan pemerintah yang signifikan. Berdasarkan keserasian belanja, proporsi belanja operasi tergolong seimbang, sedangkan belanja modal menunjukkan peningkatan yang mencerminkan fokus pada pembangunan infrastruktur sektor pariwisata dan budaya pasca pandemi. Tingkat efisiensi belanja secara keseluruhan juga tergolong tinggi, dengan rata-rata 93,30%, yang mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara optimal, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Penulis menyarankan agar pemerintah daerah menjaga keseimbangan proporsional antara belanja operasi dan belanja modal guna menghindari dominasi salah satu jenis belanja yang dapat mengganggu stabilitas keuangan serta kelancaran pembangunan, sekaligus mempertahankan tingkat efisiensi belanja dengan terus meningkatkan pengawasan internal dan kapasitas manajemen anggaran untuk memastikan pengelolaan fiskal tetap tertib. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*) yang memadukan data kuantitatif dan wawancara agar hasil analisis lebih mendalam, serta mempertimbangkan

keterkaitan belanja daerah dengan indikator makro seperti IPM, PAD, dan indeks kepuasan masyarakat sehingga penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang efektivitas penggunaan anggaran publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S. A. (2022). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 5(1), 76. <https://doi.org/10.32663/jaz.v5i1.2841>
- Arso, T., & Hi Abas, G. (2021). Konsistensi dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara terhadap APBD Tahun 2019. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 438. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.2287>
- Edtiyarsih, D. D. (2023). Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan. *Jaakfe Untan (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), 368. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>
- Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK* (Edisi 1). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus BPKPD Sebagai Leading Sektor Penganggaran). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(4), 1381–1389.
- Magdalena Y. Devinci, Yosefina Andia Dekrita, & Magdalena Silawati Samosir. (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(2), 51–70. <https://doi.org/10.59603/projemen.v9i2.44>
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi 3). UUP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi 4). UPP STIM YKPN.
- Nurachman, M., & Sopiah, I. (2024). The Influence Of Budget Planning On Performance Regional Financial and Asset Agency (Empirical Study In Majalengka District). *Journal of Business, Accounting and Finance*, 6(1).
- Said, S. W., & Bakar, A. (2021). ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN, EFEKTIVITAS DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(2), 1–0. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/177>
- Shalsabila, C. A., & Kamilah, K. (2022). Analisis Penyebab Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 117–125. <https://doi.org/10.59086/jeb.v1i2.44>
- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*.



ALFABETA, CV.

Wijaya, I., Erna Kustyarini, & Nicky Handayani. (2023). EVALUASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA RUMAH SAKIT X BEKASI. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 73–89. <https://doi.org/10.56127/jekma.v2i1.463>

Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik* (Vol. 3). CV NOAH ALETHEIA.